



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

---

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Sidang	:	I
Rapat	:	Ke – 15
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	:	Senin, 5 September 2022
Sifat	:	Terbuka
Pukul	:	10.45 WIB s.d 13.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	:	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022; 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2023. 3. Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.
Ketua Rapat	:	H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E.,M.Si
Sekretaris	:	Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	:	... Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	:	Sekjen, Irjen, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 10.45 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada hari ini adalah Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022, membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2023 dan Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal (Setjen); Inspektorat Jenderal (Itjen); Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per bulan Agustus 2022 sebagai berikut:

NO.	UNIT ORGANISASI	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
1.	Sekretariat Jenderal	56,68%	58,12%
2.	Inspektorat Jenderal	50,06%	50,59%
3.	BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	53,86%	54,67%
4.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	51,56%	53,09%

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekjen; Irjen, Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

*Dalam ribuan rupiah*

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU KEBUTUHAN TA 2023	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2023	PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2023	SELISIH
		A	B	C	A-C
1.	Sekretariat Jenderal	229.500.000	225.000.000	221.170.000	8.330.000
2.	Inspektorat Jenderal	54.750.000	51.750.000	49.674.000	5.076.000
3.	BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.860.891.224	1.792.892.120	1.787.913.120	72.978.104
4.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	211.265.039	134.786.762	131.339.762	79.925.277

3. Komisi V DPR RI bersama Setjen; Itjen; BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 5 September 2022

KETUA RAPAT,



ANDI IWAN DARMAWAN ARAS

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,



TAUFIK MADJID

Pit. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,



EKO SRI HARYANTO

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DDTT  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRASMIGRASI,



LUTHFIYAH NURLAELA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI  
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,



IVANOVICH AGUSTA